# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/129/KPTS/03/2023

TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor B/18/KPTS/03/2023 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sehubungan adanya penambahan kebutuhan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Bupati maka Keputusan Bupati Nomor B/18/KPTS/03/2023 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Preseden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B/18/KPTS/03/2023 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd -

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/129/KPTS/03/2023
TANGGAL: 20 Februari 2023

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Judul Rancangan Peraturan Bupati | Perangkat Daerah Pemrakarsa |
|---|---|---|
| 1 | Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja Fm | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 | |
| 4 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 | |
| 5 | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi yang Berbudaya Kinerja Baik dan Responsif | |
| 6 | Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | |
| 7 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 | |
| 8 | Pedoman Pengumpulan Data Kinerja | |
| 9 | Rencana Aksi Dearah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024 | |
| 10 | Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Hebat | |
| 11 | Santunan Kematian bagi Masyarakat | Dinas Sosial |
| 12 | Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kebutuhan Pokok | |
| 13 | Pedoman Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam | Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 14 | Pedoman Pelaksanaan Pembubaran Koperasi di Pemerintah Daerah | |
| 15 | Kebijakan Industri Daerah | |
| 16 | Pengelolaan Lamban Kemasan | |
| 17 | Perubahan Perbup Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Pelataran, Los Kios dan Pertokoan/Rumah Toko Milik Pemerintah Daerah | |
| 18 | Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | Pedoman Persetujuan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 20 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 21 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | |
| 22 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | |
| 23 | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | |
| 24 | Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | |
| 25 | Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | |
| 26 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | |
| 27 | Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 28 | Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah | |
| 29 | Tambahan Penghasilan Pegawai | |
| 30 | Pembagian Alokasi Dana Pekon setiap Pekon Tahun Anggaran 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon |
| 31 | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2022 | |
| 32 | Pedoman Pemilihan Peratin | |
| 33 | Pedoman Pelatihan Masyarakat dan aparatur Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon | |
| 34 | Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Pekon | |
| 35 | Badan Usaha Milik Pekon | |
| 36 | Standar Satuan Harga Pekon | |
| 37 | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penangulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 38 | Pedoman Pembentukan Pekon Penanggulangan Bencana | |
| 39 | Pedoman Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pengelola Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi Didalam Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 40 | Pengelolaan Kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelatihan dan Pengembangan Komoditas Kopi | Dinas Perkebunan dan Peternakan |

| | | |
|---|---|---|
| 41 | Pedoman Teknis Audit Kinerja Berbasis Risiko | Inspektorat |
| 42 | Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit dengan Tujuan Tertentu Serta Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | |
| 43 | Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Peratanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 44 | Pemberian Bantuan insentif bagi guru non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Pendidikan |
| 45 | Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 46 | Beasiswa Pendidikan Kesenian | |
| 47 | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata | |
| 48 | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar | Dinas Kesehatan |
| 49 | Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | |
| 50 | Perubahan Besaran Tarif Retribusai Izin Usaha Perikanan | Dinas Perikanan |
| 51 | Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir | Dinas Perhubungan |
| 52 | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan | Bagian Organisasi |
| 53 | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah | |
| 54 | Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah | |
| 55 | Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Pasca Peyederhanaan Birokrasi | |
| 56 | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah | |
| 57 | Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah | |
| 58 | Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 59 | Kode Etik dilingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |

| | | |
|---|---|---|
| 60 | Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Bagian Tata Pemerintahan |
| 61 | Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026 | |
| 62 | Perubahan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat | Bagian Kesejahteraan Rakyat |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008